

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bangsa-bangsa di dunia sudah lama menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama perekonomian, masyarakat ingin mengetahui sumber dari pertumbuhan ekonomi., apakah kenaikan standar kehidupan yang di nikmati masyarakat selama ini di sebabkan oleh banyak nya modal yang tersedia atau kemajuan teknologi. Pada saat sekarang ini Indonesia sudah melaksanakan otonomi daerah yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dalam mengelola perekonomian. hal ini terlihat dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pemerintahan lokal yang bersifat otonom sebagai pencerminan dilaksanakannya asas desentralisasi di bidang pemerintahan dan kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan yang bersifat otonom ini artinya pemberian wewenang yang kemudian akan menjadi kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi pada gilirannya akan menimbulkan kewajiban bagi segenap aparatur pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan sekaligus juga meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerahnya. Keberhasilan

otonomi daerah diukur dari seberapa besar porsi sumbangan masyarakat lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini bukan hanya sekedar pelimpahan kewenangan yang diikuti dengan pemberian sebagian sumber pendapatan bagi daerah untuk mendukung dan melaksanakan pelayanan publik, bukan juga berkuat pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara otonom, tetapi lebih dari itu yakni adanya peluang dan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah dan segenap masyarakatnya secara bersama-sama untuk mengembangkan perekonomian daerah sendiri sesuai potensi dan kondisi riil yang ada di masing-masing daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktifitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Indikator ini penting bagi daerah untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan akan lebih merata jika pertumbuhan berjalan secara beriringan dan terencana. Dengan demikian maka daerah yang

miskin, tertinggal tidak produktif akan menjadi produktif, yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan itu sendiri

Menurut Kuncoro (2000) Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari otonomi daerah. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengurus mengembangkan dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diprosikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Desentralisasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang disempurnakan oleh UU No. 33 Tahun 2004. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan hasil penerimaan daerahnya untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, oleh karena itu peningkatan PAD, DAU dan DAK selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dan peningkatan PAD, DAU dan DAK tersebut harus berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi daerah, namun daerah tidak akan berhasil, bila daerah tidak mengalami Pertumbuhan Ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD, DAU dan DAK. Keberhasilan peningkatan PAD, DAU dan DAK hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya dalam Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Tambunan (2006) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasar Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan, Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan

DAU pemerintah daerah dapat menggunakan untuk memberi layanan yang lebih baik kepada publik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan DAK, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan public (Badrudin, 2016).

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya, Sukoco (2005) dalam Penelitiannya menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Langkah Penting yang harus dilakukan pemerintah adalah menghitung potensi PAD yang riil yang dimiliki. Dana Alokasi Umum juga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, karena semakin besar DAU yang didapat maka semakin besar pula kemampuan suatu daerah untuk mendanai daerah. Dana Alokasi Khusus juga mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, DAK juga harus lebih ditingkatkan.

Tabel 1.1

Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (RP)	Dana Alokasi umum (RP)	Dana Alokasi Khusus (RP)	PDRB (RP)
2011	14.356.365.036	257.556.166.000	50.546.600.000	2.770.910.000.000
2012	19.705.802.062	295.529.443.000	18.749.835.000	2.967.370.000.000
2013	24.266.664.871	344.517.814.000	27.503.860.000	3.218.240.000.000
2014	33.199.858.218	365.298.130.000	27.039.360.000	3.460.940000.000
2015	36.246.931.834	370.113.129.000	40.221.070.000	3.705.360.000.000
2016	36.632.476.944	425.686.742.000	119.076.027.375	3.946.470.000.000
2017	31.420.979.313	419.516.054.000	90.368.820.617	4.183.870.000.000
2018	34.184.049.669	422.532.652.000	92.650.598.379	4.388.180.000.000
2019	34.900.741.628	447.899.516.000	104.459.666.251	4.60.7.81.000.000
2020	29.050.525.938	412.574.295.000	96.245.171.522	4.60.0.23.000.000
2021	37.629.350.638	405.067.761.000	92.797.100.309	4.768.84.000.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh , <http://www.djpk.kemenkeu.go>.



Pada tabel 1.1 diatas Produk Domestik Regional Bruto Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2011 Produk Domestik Regional Bruto sebesar Rp. 2.770.910,54 dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 4.602.980,14. Pada tabel Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh 2011-2020 mengalami fluktuasi , dimana yang mengalami Pertumbuhan Ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,45% atau meningkat dari 7,09% dari tahun sebelumnya, sedangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar -0,14%.

Pada tabel Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh Pada tahun 2011-2020 mengalami fluktuasi, Pada tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 14.356.365.035 dan dapat dilihat pada tahun berikutnya pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh terus meningkat setiap tahunnya dan terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 29.050.525.93.

Pada tabel Dana Alokasi Umum Kota Sungai Penuh juga mengalami fluktuasi dapat dilihat pada tahun 2011 Dana Alokasi umum sebesar Rp. 257.556.166.000 dan dapat dilihat pada tahun berikutnya Dana Alokasi umum terus meningkat dan terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 412.574.295.000. Pada tabel Dana Alokasi Khusus tahun 2011 sebesar Rp. 50.546.600.000 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar Rp. 18.749.835.000 dan mengalami peningkatan sampai tahun selanjutnya. Dapat di disimpulkan pada tabel Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi

Khusus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dana Alokasi Umum menyumbang dana terbesar pada Dana Perimbangan.

Di tengah kondisi pemulihan ekonomi Indonesia yang goncang karena pengaruh pandemi, perekonomian Kota Sungai Penuh periode 2017 - 2021 dapat tetap tumbuh secara fluktuatif, yakni sebesar 6.02%; 4.88%; 5.01%; -0.16% dan 3,67%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. Pada tahun 2021, perekonomian Kota Sungai Penuh secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 3,67%. Hal ini mencerminkan sudah mulai beransur pulihnya perekonomian Kota Sungai penuh pasca kondisi Pandemi Covid-19. Pandemi covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun dari sisi permintaan akhir (*demand side*).

Pada sumber pendanaan di atas, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam Pertumbuhan Ekonomi. Hasil dari PAD, DAU dan DAK itu sendiri akan di kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh tahun 2011-2021 mengalami perkembangan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh adanya tren fluktuatif.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “ **Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Perekonomian Kota Sungai Penuh**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti di jawab dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Perekonomian Kota Sungai Penuh secara parsial dan simultan?
2. Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Perekonomian Kota Sungai Penuh secara parsial dan simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Perekonomian Kota Sungai Penuh secara parsial dan simultan
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Perekonomian Kota Sungai Penuh secara parsial dan simultan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, terutama dalam hal pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Perekonomian.

2. Manfaat teoritis

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam wawasan yang berhubungan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Perekonomian di Kota Sungai Penuh
- b. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki

daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembangunan yang ada di daerah, sehingga masyarakat bias ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan.

